

Government Collaboration in Stunting Prevention Programme in Medan City

Nabila Fahira Nasution^{1*}, Februati Trimurni²

Faculty of Social Sciences, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Nabila Fahira Nasution nabilafahiranst@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Collaboration, Local Government, Countermeasures, Stunting

Received : 15, November

Revised : 20, December

Accepted: 25, January

©2024 Nasution, Trimurni: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research focuses on stunting prevention by looking at the level of collaboration between local governments in overcoming stunting in Medan City. Qualitative research methodology with a descriptive approach was used in this study. In-depth interviews and observations were used to collect primary data. Data and information on the collaboration process and the relationship between the government, private sector, and community were collected directly from each of the Medan City Government agencies involved. Secondary data were collected from authorised individuals and agencies in the form of papers, reports, and scientific publications in the form of processed data. Data analysis techniques included data reduction, data display, and conclusion drawing. The research findings show that government collaboration in stunting prevention in Medan City consists of three fundamental pillars in the notion of collaboration and, as a result, developed a coordination forum. In addition, although not statistically significant, the partnership process has resulted in a decrease in stunting rates. The Medan City government's efforts to learn and build trust with the community contributed to the success of the stunting prevention programme.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah gizi yang dihadapi anak di dunia modern adalah prevalensi balita pendek yang sering disebut dengan stunting. Fenomena stunting pada anak dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tidak memadainya pelayanan kesehatan dan kesehatan (Beal et al., 2018). Begitu juga di Indonesia, stunting juga menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia dengan angka kejadian yang relatif tinggi (Mediani et al., 2022). Tercatat dari tahun 2021, Indonesia memiliki 24,4% kasus stunting (Sehatnegeriku.kemkes.go.id, 2023).

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Tercatat hingga tahun 2022, angka stunting seluruh Indonesia adalah 24% dengan rata-rata Sumatera Utara berada pada angka 25,7%. Penurunan angka stunting masih terus menjadi program utama pemerintah khususnya pemerintah Sumatera Utara dengan melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu keberhasilan program penanggulangan stunting. Pada penelitian ini, peneliti mengkhususkan penelitian penanggulangan stunting di Kota Medan untuk melihat sudah sejauh mana kolaborasi pemerintah di Kota Medan dalam menanggulangi angka stunting (Detik.com, 2022).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan bahwa angka stunting di Kota Medan tahun 2019-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 491 dengan persentase 17,4%. Berbeda dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan angka stunting di Kota Medan pada tahun 2019-2022 berjumlah 2.249.081 jiwa. Data yang mencakup tentang angka stunting di Kota Medan yang telah dijabarkan di atas memiliki perbedaan satu sama lain namun keduanya menunjukkan kasus stunting cukup tinggi. Hal ini merupakan salah satu kendala karena data yang belum konkrit dan memadai serta banyak program pendorong pencapaian cakupan layanan yang belum tersedia (Kompas.com, 2022).

Mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 18 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu, mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah, serta mengintegrasikan dan mengharmonisasikan percepatan pelaksanaan pencegahan stunting di daerah, pemerintah Kota Medan menerbitkan Keputusan Walikota Medan No. 440/32.K untuk berkolaborasi dalam upaya penurunan stunting di Kota Medan. Keputusan tersebut mengatur keterlibatan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), pihak swasta, masyarakat, serta Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagai Ketua Koordinator.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menjelaskan tentang kolaborasi pemerintah dalam berbagai program pemerintah di Indonesia. Keterlibatan berbagai sektor merupakan hal utama tercapainya kolaborasi pemerintah dalam suatu program (Sukanti & Faidati, 2021). Keberhasilan program akan lebih maksimal bila masyarakat juga berperan aktif (Ipan et al., 2021). Maka

dari itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kolaborasi pada program pemerintah berpengaruh positif secara signifikan (Rahmasari & Wicaksono, 2021). Selain itu, hal penting yang perlu ditekankan dalam konsep kolaborasi adalah pemahaman dan kepercayaan publik (Putri & Nurcahyanto, 2021).

Penelitian lain menambahkan bahwa peningkatan sumber daya merupakan salah satu pendukung keberhasilan kolaborasi (Rumuat et al., 2022). Adanya faktor kepemimpinan juga dapat mendorong keberhasilan pengambilan kebijakan (Saufi, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan agar melihat program pemerintah Kota Medan dengan menerapkan konsep kolaborasi pemerintah. Penulis merasa penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana konsep kolaborasi pemerintah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di Kota Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Pemerintahan

Leach dan Percy Smith mengungkap pergeseran antara konsep government dengan konsep governance bahwa adanya pengaruh-pengaruh politik dalam pemerintah saat melakukan pelayanan sehingga elemen lain dalam sebuah negara tidak mengambil peran pada konsep government, sedangkan konsep governance mampu melebur antara pemerintah dengan elemen lainnya sehingga seluruh elemen memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama (Hetifah, 2009). Chema (2007) menyatakan bahwa governance menekankan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam proses kebijakan yang akan dijalankan. Menyambung pernyataan tersebut, Emerson menyatakan bahwa governance merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mengatur sektor publik dan sektor swasta (Rahayu, 2019). Governance adalah cara untuk membuat kebijakan tertentu yang mengikutsertakan pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Kurniawan, 2007).

Kolaborasi Pemerintah

Dalam konsep collaborative governance adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell & Gash, 2008). Collaborative governance merupakan paradigma baru yang mampu memperlihatkan adanya multisektor dalam keterlibatan urusan publik dengan ciri khas tertentu yang menjelaskan seberapa penting melakukan kolaborasi (Silvia, 2011). Konsep kolaborasi memberikan gambaran tentang bagaimana fasilitas dan pelaksanaan multi organisasi agar mampu memecahkan masalah (O'leary & Vij, 2012). Pemanfaatan pendekatan multi-actor pada collaborative governance memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan sederhana.

Model Kolaborasi Pemerintah

Model tata kelola kolaboratif didasarkan pada delapan prinsip utama yang diusulkan oleh Saigler, yaitu warga negara harus dilibatkan dalam produksi barang publik, masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, para profesional harus dilibatkan untuk memberdayakan warga negara, pembuatan kebijakan harus dilakukan secara musyawarah, kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkesinambungan, kebijakan harus strategis, dan kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan pendapat Ratner, ada tiga proses tata kelola kolaboratif: mengidentifikasi hambatan dan peluang, memperdebatkan strategi pengaruh, dan merencanakan tindakan kolaboratif (Ratner, 2012). Namun, peneliti melihat bahwa tidak satu pun dari kedua interpretasi ini yang sesuai dengan latar penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash, yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

METODOLOGI

Pada penelitian ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menjadi pilihan peneliti dalam menggunakan metode penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu cara yang mampu menghasilkan data deskriptif dengan mengamati perilaku subjek dan pendekatan ini juga mampu memperlihatkan setting dan individu secara menyeluruh, seperti subjek penyelidikan berupa individu maupun organisasi juga mampu memperluas pandangan (Furchan, 1992). Metode deskriptif menggunakan objek, status kelompok, kondisi, kerangka berfikir, ataupun peristiwa yang sedang terjadi dengan tujuan untuk membuat deskriptif yang mencakup informasi yang sistematis, faktual, dan akurat.

Metode penelitian ini digunakan penulis untuk membahas tentang Kolaborasi Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Stunting di Kota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Sumber data terdiri atas sumber data primer dengan beberapa informan, yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan, BAPPEDA Kota Medan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, dan masyarakat. dan sumber data sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal, opini publik, perundang-undangan, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model Miles and Huberman (2008), yaitu reduksi data, display data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kota Medan Pada Program Penanggulangan Stunting

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, program penanggulangan stunting di Kota Medan melibatkan berbagai sektor dan instansi pemerintah. Adapun yang menjadi acuan bagi setiap pelaksana program penanggulangan stunting di Kota Medan, yaitu SK Walikota Medan. Surat Keputusan tersebut

mencakup tentang pembagian tugas, keterlibatan instansi pemerintah, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Pembagian tugas dijadikan sebagai acuan bagi seluruh OPD yang terlibat dalam kolaborasi pemerintah pada program penanggulangan stunting di Kota Medan. Setiap pembagian tugas memiliki uraian tugasnya masing-masing.

Tabel 1. Uraian Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kota Medan 2023

No.	Instansi	Uraian Tugas
1	Walikota Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan yang luas kepada semua anggota tim. • Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi keterbatasan dan rintangan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Medan. • Memberikan panduan umum, teknis, dan operasional untuk inisiatif percepatan penurunan stunting di Kota Medan. • Meningkatkan tugas, fungsi, dan peran bidang-bidang yang ada dalam tim percepatan penurunan stunting Kota Medan.
2	Wakil Walikota Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan pengendalian seluruh inisiatif percepatan penurunan stunting di Kota Medan. • Menyusun strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di semua tingkat kewenangan. • Meningkatkan fungsi dan tugas komandan

		<p>lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan konsultasi stunting tingkat kota.
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	<ul style="list-style-type: none">• Membantu koordinasi tugas, tanggung jawab, dan peran anggota tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Medan.• Membantu dalam proses pengorganisasian kerja sama dan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka percepatan penurunan stunting.• Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pendampingan untuk ketua manajemen percepatan penurunan stunting.• Memantau bagaimana aksi konvergensi intervensi stunting yang terintegrasi dilakukan.• Membuat pelaporan dan infrastruktur pendukung operasional percepatan penurunan stunting di Kota Medan.
4	Dinas Kesehatan Kota Medan	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan proses rujukan dan bantuan untuk memenuhi target stunting.• Mengkoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan mekanisme bantuan yang menjamin untuk kelompok sasaran dan keluarga yang mengalami stunting, sesuai dengan kebijakan nasional dan rencana aksi

		<p>nasional untuk pengurangan stunting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan surveilans stunting pada rumah tangga rentan di Medan. • Koordinasi upaya untuk memastikan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting di Kota Medan. • Koordinasi pemberian bantuan jaminan percepatan penurunan stunting kepada kelompok sasaran di Kota Medan. • Mengadakan pertemuan internal di bidang layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan teknis dan administratif secara ekstensif untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting. • Melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan status pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Peraturan pelaksana serta partisipasi pemerintah dan sektor lainnya diatur dalam perundang-undangan yang jelas. Peraturan dikeluarkan melalui pusat dan diadaptasi oleh masing-masing daerah. Pemerintah Kota Medan membentuk kebijakan bagi beberapa OPD untuk ikut terlibat dalam penanggulangan stunting. Setelah adanya peraturan yang dikeluarkan terkait dengan percepatan penurunan stunting, maka seluruh yang ikut terlibat dalam

peraturan tersebut harus saling bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam menekan angka stunting. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing OPD melakukan berbagai upayanya sesuai dengan uraian tugas yang dijelaskan pada table diatas.

Kolaborasi Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Stunting di Kota Medan

Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan melakukan komunikasi langsung untuk berkoordinasi. Dalam program tersebut, seluruh pemerintah Kota Medan melakukan forum-forum terbuka, yaitu Forkopimda dan 8 Aksi Konvergensi Stunting. Kedua forum koordinasi ini berguna untuk merealisasikan proses kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan. Forum-forum tersebut membahas persoalan stunting di Kota Medan melalui survei langsung kepada masyarakat. Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam memberikan edukasi dan pemahaman dapat dibuktikan pada pembahasan forum-forum tertentu. Setiap forum dihadiri oleh masing-masing OPD yang berkaitan dengan penanggulangan stunting di Kota Medan.

Setiap program yang dilakukan oleh masing-masing OPD terus dievaluasi dan di tanggung jawabi oleh bidang terkait. Forum ini memperlihatkan bagaimana pemerintah saling terbuka terhadap informasi serta saling bertukar pikiran untuk melakukan upaya-upaya baru. Salah satu faktor keberhasilan suatu proses kolaborasi adalah koordinasi yang baik serta pemahaman tentang pencapaian tujuan bersama.

Seluruh OPD menjalankan tupoksi sesuai dengan aturan yang telah dibuat serta peran kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota untuk terus melakukan pengawasan dan pemberi arahan. Sebagai forum pendukung, DPRD Kota Medan melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kota Medan cukup efektif untuk terus menunjang kinerja para pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting ini memerlukan peranan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah serta kepercayaan masing-masing OPD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepercayaan antar OPD sudah terbangun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program-program dan forum koordinasi yang terus dilaksanakan dengan baik. Konflik dan dinamika yang terjadi tidak dijadikan alasan bagi masing-masing OPD untuk menunda pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Upaya penurunan stunting terus berjalan dengan baik.

"Kami bekerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kami percaya dengan saling berkolaborasi dapat membantu program ini terus berproses dan mencapai tujuan. Karena sudah cukup banyak upaya yang kami lakukan dan dengan jangka waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 2020" (Wawancara, Iin 31 Maret 2023).

Membangun kepercayaan bukan hanya diperlukan oleh para pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan juga harus mampu membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Mengingat bahwa kolaborasi pemerintah

dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari bahaya stunting. Berbagai upaya yang dilakukan seperti melakukan edukasi, membentuk forum sosialisasi, pemberian bantuan, publikasi dan pembaharuan program telah dilakukan untuk masyarakat. Namun, hingga saat ini kendala dan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah Kota Medan.

"Memang benar beberapa kali diberikan bantuan kepada ibu-ibu yang mengalami anak stunting di daerah kami, seperti dapur stunting memberikan makanan sehat dan pemberian uang tunai melalui program bapak asuh anak stunting, tapi kalau saya lihat bantuan ini belum dipergunakan masyarakat dengan benar, saya tetap berharap sih karena ekonomi kita belum pulih kan, memang masyarakat kita khususnya ibu-ibu yang memiliki tanggungan lebih karena anaknya stunting memang harus dibantu" (Wawancara, Vina 23 Mei 2023).

Selain aspek kepercayaan public, penelitian ini juga melihat bagaimana hasil pertengahan setelah upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan angka stunting. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya titik terang yang diciptakan dalam proses kolaborasi dengan adanya perubahan angka stunting.

"Sudah lumayan, karena dari program kami sudah naik menjadi 3-5 cm dari 1-5 cm untuk tinggi badan. Walaupun ada juga yang tetap stuck tinggi badannya. Namun, kalau dilihat dari data SSGI juga menurun kok" (Wawancara, Dwi 17 April 2023).

Selain itu, Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan memberikan keuntungan langsung pada masyarakat. Upaya pemerintah Kota Medan dalam menekan angka stunting tercapai walaupun belum signifikan. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan berkembang semakin baik serta mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam kolaborasi, dibutuhkan komitmen bersama selama proses kolaborasi berjalan. Hal ini dibuktikan oleh komitmen dalam proses kolaborasi dari masing-masing stakeholders yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintah penanggulangan stunting di Kota Medan. Komitmen yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi agar mencapai tujuan program yaitu percepatan penurunan stunting.

Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan menekankan komitmen sebagai faktor utama yang mendukung keberhasilan program. Berbagai upaya yang dilakukan masing-masing OPD untuk menekan penurunan angka stunting cukup berhasil dengan didukung komitmen dari para pelaksana kebijakan. Dari hasil wawancara, masing-masing informan menyatakan bahwa komitmen yang dilakukan saling berkesinambungan satu sama lain. Komitmen dari stakeholders terkait dalam menjalankan program tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan proses penanggulangan stunting.

"Ada komitmennya. Kami sudah berkomitmen melalui Kabid kami dan Kadis. Komitmen kami di tahun 2022 0,38 dan Kadis kami berkomitmen untuk menurunkan angka stunting hingga 0,3 dan tercapai. Itu yang mengartikan bahwa kami berkomitmen. Hal ini dapat terjadi karena kerjasama dengan banyak OPD" (Wawancara, Asnita 16 Maret 2023).

Penguatan komitmen yang dilakukan oleh setiap OPD yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Kota Medan dapat dilihat melalui upaya dari penurunan angka stunting. Upaya yang dilakukan oleh OPD terkait cukup menciptakan perubahan yang signifikan. Hal tersebut dinyatakan oleh informan dalam penelitian ini. Terwujudnya keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan tidak lepas dari pemahaman bersama. Pemahaman bersama memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberhasilan proses kolaborasi. Koordinasi yang baik dapat terjalin apabila adanya pemahaman bersama.

“Ya, sudah paham. Pemahaman kami dengan OPD yang lain terkait penurunan stunting ini sudah sama. Dengan kami saling bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya penurunan stunting ini artinya kami sudah menyamakan persepsi kami.” (Wawancara, Dwi 17 April 2023).

Keberhasilan program penanggulangan stunting di Kota Medan dapat dilihat melalui data yang telah dijabarkan sebelumnya. Konsep kolaborasi pemerintah dapat menjawab permasalahan stunting di Kota Medan. Dengan pemahaman bersama, para pelaksana kebijakan dapat mewujudkan keberhasilan dalam proses kolaborasi. Informan diatas menjelaskan bahwa adanya persamaan persepsi sehingga mampu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik oleh masing-masing OPD. Pemahaman bersama menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses kolaborasi pemerintah pada program penanggulangan stunting di Kota Medan. Selain itu, hasil wawancara dengan berbagai informan juga memperlihatkan persamaan definisi permasalahan dalam proses kolaborasi pemerintah pada program penanggulangan stunting di Kota Medan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kolaborasi pemerintah merupakan konsep pemecahan masalah yang melibatkan tiga sektor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam menanggulangi permasalahan stunting, pemerintah Kota Medan melakukan upaya berkoordinasi dan saling bekerja sama dengan tiga sektor tersebut. Walikota, Wakil Walikota, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sektor Swasta, dan Masyarakat merupakan stakeholder yang berperan dalam menanggulangi stunting di Kota Medan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang dilakukan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah berjalan baik. Upaya menyatukan pemahaman dan menimbulkan kepercayaan terhadap publik merupakan salah satu cara utama untuk mendukung keberhasilan program penanggulangan stunting di Kota Medan. Harapannya, penelitian ini di masa depan akan menemukan kebaruan data angka stunting sehingga dapat menunjukkan keberhasilan konsep kolaborasi pada program penanggulangan stunting di Kota Medan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik “Kolaborasi Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Stunting di Kota Medan”. Penelitian selanjutnya

dapat menggunakan objek Program Penanggulangan Stunting yang berbeda untuk menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & child nutrition*, 14(4), e12617.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (2007). *Decentralizing governance: emerging concepts and practices*.
- Detik. (2022). Angka Stunting Sumut di Atas Rata-rata Nasional, dalam detik.com (diakses pada 18 Desember 2022)
- Furchan, A. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *KINERJA*, 18(3), 383-391.
- Kompas. (2022). Di Kota Medan, Hanya 1 Kecamatan yang Bebas Stunting, dalam regional.kompas.com (diakses pada 14 Desember 2022)
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 16-17.
- Mediani, H. S., Hendrawati, S., Pahria, T., Mediawati, A. S., & Suryani, M. (2022). Factors affecting the knowledge and motivation of health cadres in stunting prevention among children in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 1069-1082.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- O'leary, R., & Vaj, N. (2012). Collaborative public management: Where have we been and where are we going?. *The American review of public administration*, 42(5), 507-522.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan.

- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 68-85.
- Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2018). *Birokrasi dan Governance Teori, Konsep dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahmasari, S. A., & Wicaksono, I. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals.
- Ratner, B. D., Barman, B., Cohen, P., Mam, K., Nagoli, K., & Allison, E. H. (2012). Strengthening governance across scales in aquatic agricultural systems.
- Rumuat, S. A., Husin, H., & Muhlin, M. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kabupaten Banggai. *Journal of Tompotika: Social, Economics, and Education Science*, 3(05), 85-100.
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1). 80-95.
- Sehatnegeriku. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%, dalam sehatnegeriku.kemkes.go.id (diakses 26 Maret 2023)
- Seigler, D. (2011). *Renewing Democracy by Engaging Citizens in Shared Governance*.
- Silvia, C. (2011). Collaborative governance concepts for successful network leadership. *State and local government review*, 43(1), 66-71.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 91-113.
- Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 440/32.K. tentang penetapan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kota Medan